

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada setiap sistem pemerintahan yang berjalan sampai saat ini, desa memiliki peran yang sangat penting serta strategis dalam hal membantu penyelenggaraan program yang telah dibuat oleh pemerintah daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecamatan Pagimana memiliki jumlah penduduk 25.891 jiwa dengan jumlah laki-laki 13.122 jiwa dan perempuan 12.769 jiwa. Kecamatan Pagimana itu sendiri memiliki 3 kelurahan dan 30 desa yaitu Kelurahan Pagimana, Basabungan, Pakowa, Desa Lamo, Tongkonunuk, Jaya Bakti, Sinampangnyo, Hohudongan, Pinapuan, Nain, Ampera, Asaan, Bulu, Dongkalan, Baloa Doda, Pisou, Lambangan, Sepa, Taloyon, Uwedaka, Tinting, Bondat, Bungawon, Huhak, Tombang, Poh, Toipan, Siuna, Sama Jatem, Balaigondi, Tampe, Gomuo dan Bajo Poat.

Setiap desa memiliki tanggung jawab dan peranan penting dalam proses pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang di salurkan dalam jangka waktu 1 tahun. Penggunaan anggaran keuangan desa ini harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDesa) yang telah disepakati dari awal oleh pemerintah desa, aparat desa serta masyarakat desa itu sendiri. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan sebuah sistem tata kelola keuangan desa yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan tujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam hal penggunaan anggaran desa yang sesuai dengan RKPDesa yang berlandaskan Undang – Undang dan sekaligus akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa itu sendiri.

Sistem Keuangan Desa ini di rancang dengan *user friendly* sehingga kepala desa dan operator dapat dengan mudah menggunakan aplikasi ini dalam hal perencanaan dan pelaporan keuangan desa lebih terstruktur dan sistematis kepada BPKP. Dengan adanya sistem ini dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah desa serta dalam proses pengelolaan keuangan desa akan lebih efektif dan efisien, apabila pengelolaan keuangan terstruktur dengan baik dan benar maka hubungan yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat setempat akan dilandasi kepercayaan.

Implementasi SISKEUDES di Kecamatan Pagimana yang hampir 3 tahun digunakan oleh operator dalam pengelolaan keuangan desa masih di dapatkan masalah *usability* yang mempengaruhi operator untuk menggunakan sistem tersebut. Dalam penggunaan sistem terdapat fitur sulit dipahami, operator kesulitan dalam memahami *interface* sistem sehingga mengakibatkan operator harus memerlukan bantuan teknik yang tidak lain adalah pendamping desa. Untuk menilai *usability* dan mengetahui efektif dan efisien implementasi SISKEUDES maka perlu dilakukan evaluasi sistem dengan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS). Metode SUS digunakan untuk memastikan *interface* sistem sudah *user*

friendly serta proses pengujian ini lebih menitikberatkan pada perspektif dari pengguna akhir sehingga akan menghasilkan evaluasi yang lebih realistis. Pemerintah di minta harus melakukan *update* sistem secara berkala untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna dalam hal ini adalah masyarakat. Dalam proses pengujian menggunakan metode SUS yang memiliki 10 poin pertanyaan yang berkaitan dengan sistem kemudian akan diberikan kepada responden sebagai tolak ukur penilaian kualitas *usability*. SUS juga tidak memerlukan jumlah sampel yang banyak sehingga dapat meminimalkan biaya (Brooke, 1996).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengukur nilai tingkat kepuasan pengguna pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) untuk meningkatkan efektif dan efisien dalam proses pengelolaan anggaran desa?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini berfokus pada proses perencanaan, pengelolaan, pelaporan serta pertanggungjawaban terhadap keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa .
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdapat di masing-masing desa yang berada di Kecamatan Pagimana.
3. Proses evaluasi dan pengukuran tingkat kepuasan menggunakan metode System Usability Scale (SUS).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas *usability* pada aplikasi SISKEUDES serta mengevaluasi tingkat kepuasan pemerintah desa setempat dalam penggunaan sistem pengelolaan anggaran yang menjadi satu-satunya sistem pengelolaan anggaran.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi untuk para peneliti yang mengambil studi kasus penelitiannya mengenai pengukuran tingkat kualitas *usability* terhadap sistem keuangan desa.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak dari BPKP, Kecamatan Pagimana dan pemerintah desa dalam mengetahui sistem keuangan desa yang telah mereka sepakati untuk digunakan sudah sesuai kebutuhan pengguna atau perlu diperlukan pengembangan sistem guna menjadikan SISKEUDES lebih baik lagi.